BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, yang memiliki 17.504 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km serta luas wilayah laut sekitar 5,9 juta $Km^{2.}$. Sebagai negara kepulauan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Negara Kepulauan (Archipelago State) oleh konfrensi PBB yang diakui oleh dunia Internasional maka lndonesia mempunyai kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut lndonesia. Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis di antara Benua Asia dan Benua Australia. Peranan laut sangat penting sebagai pemersatu bangsa serta wilayah lndonesia dan konsekwensinya Pemerintah berkewajiban atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang penegakan hukum baik terhadap ancaman pelanggaran terhadap pemanfaatan perairan serta menjaga dan menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistim yang berada diluar kapal yang di design untuk meningkatkan keselamatan dan effisiensi bernavigasi kapal dan / atau lalu lintas kapal.

Fungsi pelayanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran meliputi: Menentukan posisi dan / atau haluan kapal, Pemberitahuan adanya bahaya atau rintangan pelayaran, Sebagai batas – batas alur pelayaran yang aman, Sebagai garis pemisah lalu lintas kapal, Menunjukan kawasan dan / atau kegiatan khusus di perairan, Sebagai batas wilayah suatu negara.

Laut sebagai jalur komunikasi (sea lane on communication) diartikan bahwa pemanfaatan laut untuk kepentingan lalu-lintas pelayaran antar pulau, antar negara maupun antar benua baik untuk angkutan penumpang maupun barang, maka perlu di tentukan alur perlintasan laut kepulauan Indonesia bagi kepentingan pelayaran lokal maupun internasional serta fasilitas keselamatan pelayaran seperti Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP),

Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, Bengkel Kenavigasian, Survey Hidrografi untuk menentukan alur pelayaran yang amam serta infrastruktur lainnya. Pengaturan alur lalu-lintas dan perambuannya guna kelancaran dan keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab pemerintah dan kita bersama sebagai penguasa, pengelola, serta pengguna atas Laut. Untuk itu maka perlu ditetapkan fungsi wilayah perairan guna pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak saling menggangu antar kegiatan pengelolaan laut yang dapat menimbulkan dampak lingkungan khususnya kecelakaan terhadap transportasi laut dengan menetapkan alur dan pelintasan melalui pelaksanaan penandaan terhadap bahaya kenavigasian serta pemutakhiran kondisi perairan melalui kegiatan survey hidrografi dan kemudian diumumkan ke dunia pelayaran.

Tugas pokok Distrik Navigasi pada peraturan menteri perhubungan Nomor KM.30 Tahun 2006 yaitu Melaksanakan perencanaan pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, serta kegiatan Pengamatan Laut, Survey Hidrografi, Pemantauan Alur dan Perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran.

Fungsi Distrik Navigasi menurut peraturan menteri perhubungan Nomor KM.30 Tahun 2006 adalah untuk Penyusunan rencana dan program pengoperasian, serta pengawasan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut dan Survey Hidrografi serta Pemantauan Alur dan Perlintasan; Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut dan Survey Hidrografi, serta Pemantauan Alur dan Perlintasan; Pelaksanaan program pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, dan Fasilitas Pangkalan serta Bengkel; Pelaksanaan Pengamatan Laut dan Survey

Hidrografi, serta Pemantauan Alur dan Perlintasan; Pelaksanaan urusan logistik; Pelaksanaan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawakan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survey Hidrografi, serta Pemantauan Alur dan Perlintasan; Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi serta penyusunan laporan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul: "Optimalisasi fungsi Distrik Navigasi Kelas III Cilacap terhadap sarana pendukung kegiatan olah gerak kapal – kapal di cilacap"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa sajakah jenis – jenis sarana bantu navigasi pelayaran ?
2. Apa saja fungsi dari sarana bantu navigasi pelayaran ?
3. Apa saja kegiatan yang dilakukan Distrik Navigasi Kelas III Cilacap guna mengoptimalisasikan fungsi keberadaannya terkait pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan penulisan
   a. Untuk mengetahui jenis - jenis sarana bantu navigasi pelayaran apa saja yang digunakan Distrik Navigasi Kelas III Cilacap.
   b. Untuk mengetahui fungsi dari sarana bantu navigasi pelayaran yang ada di Distrik Navigasi Kelas III Cilacap.
   c. Untuk mengetahui kegiatan apa saja yg dilakukan di Distrik Navigasi Kelas III Cilacap guna mengoptimalisasikan sarana bantu navigasi pelayaran agar tercipta pelayaran yang aman

2. Kegunaan Penulisan
   a. Bagi Civitas Akademi

      Bagi akademi hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan agar menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar handal dan terampil sehinga dapat bersaing dalam dunia kerja.

      Bagi Distrik Navigasi Kelas III Cilacap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau input sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.
   b. Bagi Penulis

      Bagi penulis hasil penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan sekaligus sebagai sarana pengembangan sesuai dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini disusun untuk memberikan uraian mengenai susunan penulisan karya tulis yang penulis uraikan secara singkat dan sistematik dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan dalam sub bab antara lain : Latar Belakang Masalah yaitu penulis menceritakan hal - hal yang melatar belakangi mengapa penulis memilih judul karya tulis Rumusan Masalah yaitu munculnya permasalahan yang ditemukan oleh penulis. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan yaitu memberikan penjelasan penulis tentang tujuan karya tulis dan manfaat yang diperoleh pembaca setelah membaca karya tulis. Sistematika Penulisan yaitu sistematika penulisan yang penulis tulis dalam masing – masing bab.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tinjauan pustaka yang berisi tentang teori yang di gunakan dalam penyusunan karyatulis. Baik yang berasal dari buku jurnal ilmiah atau media cetak online.

BAB 3: METODOLOGI PENGAMATAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang jenis dan sumber data yang telah didapat selama 4 bulan praktek darat di Distrik Navigasi Kelas III Cilacap.

BAB 4: PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam bab ini akan diuaraikan mengenai hasil penelitian tersebut. Membahas tentang Optimalisasi Fungsi Distrik Navigasi Kelas III Cilacap Terhadap Berbagai Sarana Pendukung Kegiatan Olah Gerak Kapal – kapal di cilacap

BAB 5: PENUTUP

Dalam bab ini bersi kesimpulan, yaitu penulis menyimpulkan pembahasan permasalahan pada bab IV. Dan saran, yaitu penulis memberikan saran-saran baik secara uraian berdasarkan pemecahan masalah.